

KEMISKINAN STRUKTURAL INFORMASI

Tuti Widiastuti

Ilmu Komunikasi FEIS Universitas Bakrie

Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro

Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22, Kuningan, Jakarta Selatan

Telp (021) 5261448, Fax (021) 5263191/e-mail: tuti.widiastuti@bakrie.ac.id

Abstract

This article is based on research of social network and structural poverty at Dusun Wanasari, Desa Karangsong, Indramayu, and West Java. For people who are identified in under poverty line, they have limited access to information such as education and training program, financial supporting program, and information that delivered through communication social networking. These phenomena will be analyzed with social exchange theory from Richard M. Emerson said that people will have limited access in their social network and who has good resources will be powerful than others.

Key words: *information, structural poverty, social exchange*

Pendahuluan

Informasi merupakan unsur pokok yang secara implisit melekat dalam konsep pembangunan yang terencana. Kegiatan pembangunan yang manapun juga hanya dapat berlangsung dan mencapai sasaran yang dikehendaki, apabila dalam setiap tahapannya - perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan - didasarkan pada informasi yang memadai (Dahlan, 1997 : 2). Informasi tersebut diperoleh melalui berbagai kegiatan komunikasi, tetapi yang pada akhirnya menentukan apakah komunikasi tersebut bermakna adalah informasi yang dibawanya.

Dalam hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia, informasi memainkan peranan penting. Misalnya informasi harga, cuaca, transaksi perdagangan, perkiraan biaya, pelaksanaan anggaran, pendidikan, kesehatan, asuransi, dan lain sebagainya sangat tergantung pada kelengkapan, kebenaran dan keakuratan informasi. Bahkan untuk berbagai bidang atau profesi, informasi menduduki posisi yang begitu penting sehingga dapat menentukan keberadaan bidang yang bersangkutan. Contohnya kuliah,

penelitian, ceramah, diskusi, pidato, ditentukan oleh ketersediaan informasi.

Pemerataan pembangunan hanya dimungkinkan apabila dilakukan seiring dengan pemerataan informasi dan komunikasi (Dahlan, 1997 : 5). Karena upaya pemerataan apapun tanpa disertai pemerataan informasi dan komunikasi, yang tercapai justru sebaliknya yaitu kesenjangan. Kesenjangan ini pada akhirnya berdampak pada kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa intervensi pembangunan sering kali tidak sampai kepada sasaran sebab informasi hanya dimiliki dan dimanfaatkan oleh golongan yang bukan sasaran.

Kebanyakan informasi tidak bisa mencapai khalayak di tingkat terbawah dari struktur masyarakat karena menggunakan jaringan formal, karena orang yang duduk di jaringan formal memiliki jaringan sosialnya sendiri dan jaringan sosial ini dianggapnya lebih penting. Misalnya informasi mengenai bantuan yang mestinya ditujukan kepada warga desa ternyata tertahan di tingkat elit desa. Pada kenyataannya jaringan formal tidak jalan, misalnya ketika sang Lurah mengetahui tentang kredit, informasi tersebut tidak

dia salurkan kepada kalangan miskin di daerahnya, melainkan kepada kerabatnya (Setiawan, 1989). Dan apabila ada proyek pembangunan fisik di desa, maka yang akan mengetahui terlebih dahulu adalah elit desa. Setelah itu informasi dimanfaatkan oleh elit desa untuk kepentingan diri dan kelompoknya (Setiawan, 1989 : 3).

Contoh di atas merupakan salah satu bukti bahwa mereka yang kuat dalam perekonomian biasanya sekaligus juga merupakan golongan informasi kuat. Karena mereka lebih tahu cara mencari, mengolah dan memanfaatkan informasi dalam waktu lebih cepat, sehingga dapat lebih memperkuat posisi ekonominya. Diterjemahkan ke dalam bahasa populer, yaitu “informasi adalah uang”, yang dapat dipakai lagi menambah kekayaan informasi - yang perlu untuk menghimpun kekayaan riil lebih banyak (Dahlan, 1997 : 5). “Informasi adalah komoditi”, kata Daniel Bell (1973; dalam Dahlan, 1997) dalam bukunya *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. Komoditi yang paling berharga dalam masyarakat pasca industri adalah pengetahuan, oleh karena itu yang menjadi super elit dalam masyarakat yaitu produsen informasi pengetahuan.

Informasi memungkinkan orang untuk mengembangkan gagasan, memperoleh peluang-peluang baru, dan berbagai pembelajaran dari orang lain. Dengan kata lain, kemiskinan terjadi secara timbal balik antara miskin karena kurangnya informasi dan sulitnya memperoleh informasi karena miskin (Dahlan, 1997). Hal ini terjadi karena adanya hambatan struktural arus informasi kepada kalangan miskin.

Pemerataan informasi dan komunikasi diperlukan dalam berbagai bidang pengentasan kemiskinan, seperti bidang ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat. Kesenjangan informasi di bidang ekonomi dapat mengurangi peluang mendapatkan usaha dan penghasilan yang baik. Di bidang politik, kesenjangan informasi dapat menghambat pelaksanaan demokrasi, mengembangkan kecurigaan antar golongan, membuka peluang isu yang menyesatkan atau bahkan menutup saluran pendapat dan aspirasi masyarakat. Di bidang kesejahteraan rakyat, kesenjangan informasi dapat menghambat keefektifan berbagai

jasa pelayanan masyarakat yang menjadi dasar bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Sebagai upaya keluar dari kemiskinan berarti harus lepas dari kendala struktural dimana arus informasi tidak menjangkau masyarakat yang tidak punya akses. Struktur yang menghambat harus diidentifikasi dan dicarikan jalan penyelesaiannya, sehingga memungkinkan penyaluran informasi ke dalam jaringan-jaringan komunikasi sosial di masyarakat. Komunikasi sosial diartikan sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih partisipan di dalam konteks peristiwa-peristiwa sosial, dengan memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku individu dalam berinteraksi.

Jaringan komunikasi sosial adalah suatu rangkaian yang menghubungkan orang-orang dalam suatu masyarakat yang menunjukkan siapa-siapa yang berkomunikasi secara teratur, berapa besar jaringan itu atau berapa banyak anggota yang dihubungkannya, bagaimana arus komunikasinya “mengalir” melalui jaringan itu serta bagaimana kedudukan masing-masing orang di dalamnya (Dahlan, 1976/1977 : 13-14).

Sebagai sekumpulan orang-orang, masyarakat merupakan kumpulan hubungan-hubungan berupa hubungan darah atau keturunan, pertemanan, bertetangga, pekerjaan, dan banyak hubungan lainnya. Hubungan-hubungan ini hanya akan terjadi dan bermakna apabila ada proses komunikasi, karena tanpa komunikasi sebuah hubungan darah sekalipun kurang berarti apabila antar anggota seketurunan tersebut tidak terjadi kontak satu dengan yang lain. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memahami perilaku manusia adalah dengan mengamati atau memahami hubungan-hubungan sosialnya yang tercipta karena adanya proses komunikasi.

Dalam masyarakat terdapat banyak jaringan komunikasi, namun masing-masing jaringan komunikasi ini mempunyai kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Makin penting suatu jenis informasi bagi suatu anggota masyarakat tertentu, maka makin cepat perkembangan dan makin luas jangkauan dari jaringan informasinya. Jaringan komunikasi yang berhubungan dengan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan primer bagi suatu masyarakat akan

mempunyai jangkauan yang tercepat dan terluas. Misalnya, bagi masyarakat petani maka informasi mengenai pertanian mestinya akan merupakan informasi yang terpenting. Lain halnya dengan masyarakat nelayan, maka informasi mengenai kondisi cuaca dan lokasi penangkapan ikan akan menjadi informasi terpenting bagi mereka.

Dalam program pembangunan pengentasan kemiskinan, selalu ada proses komunikasi pembangunan yang sering disebut dengan “sosialisasi” melalui berbagai saluran informasi. Namun mengapa problem kemiskinan belum juga berhasil diselesaikan secara berarti? Mengapa informasi program pembangunan cenderung tidak sampai pada sasarannya, atau karena informasi itu tidak dimengerti oleh penerimanya? Jika tidak sampai pada sasarannya, apakah karena ada yang dengan sengaja menghentikannya di tengah jalan atau karena saluran komunikasi yang digunakan salah atau tidak tepat sasaran?

Sehingga banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, tetapi pada akhirnya pengadaan sumber-sumber daya dan pelayanan sosial dalam rangka usaha peningkatan kesejahteraan tidak sampai kepada golongan miskin mutlak yang diidentikkan memiliki kebudayaan kemiskinan. Kenyataan ini memaksa penulis untuk lebih memfokuskan penelitian pada dimensi kemiskinan struktural, karena kesulitan untuk mencapai golongan yang paling miskin ada hubungannya dengan kekurangan pengetahuan mengenai jaringan komunikasi sosial di masyarakat. Sehingga, kemiskinan di desa nelayan menyajikan sisi yang menarik untuk dicermati dari perspektif ilmu komunikasi dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi.

Kemiskinan Struktural dan Jaringan Komunikasi Sosial dalam Konteks Teori Relasi Pertukaran Sosial

Menurut Selo Soemardjan (1980 : 5), kemiskinan yang dialami oleh seorang individu oleh karena dia malas bekerja atau oleh karena dia terus-menerus sakit maka kemiskinan yang demikian adalah bersifat individual, sedangkan ‘kemiskinan struktural’ adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut

menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Berbagai konsep mengenai kemiskinan yang ditawarkan dan perdebatan yang berlangsung memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Pendekatan struktural yang lebih dominan kuantifikasi terhadap kemiskinan memiliki kekuatan pada pengangkaan dan kemampuan prediksi terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan gejala kemiskinan dalam kehidupan suatu masyarakat. Tetapi konseptualisasi kemiskinan struktural seperti ini memiliki kelemahan karena mengabaikan proses-proses kehidupan yang dijalani oleh “orang yang didefinisikan” miskin itu sendiri. Sehingga muncul kemudian pendekatan yang lebih melihat kemiskinan sebagai proses-proses hidup yang dijalani oleh orang miskin itu sendiri. Budaya kemiskinan menjelaskan bagaimana orang secara proses dan budaya menjadi miskin. Namun pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab permasalahan mengapa orang berperilaku dan memiliki budaya kemiskinan tertentu sebagai akibat dari ketimpangan dan ketidakadilan yang justru datang dari luar diri mereka.

Dalam ilmu sosial berlangsung debat mengenai kemiskinan dan bagaimana mengurangi angka kemiskinan di dunia. Berbagai debat itu berlangsung, tetap perlu ada patokan dalam melihat kemiskinan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini tampaknya pendekatan kemiskinan yang bersifat struktural menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah dan pencapaian tujuan dari proses pembangunan yang berlangsung.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, maupun akses. Hal ini mengakibatkan orang miskin tersingkir dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Lebih dari itu, segala pekerjaan/usaha yang mereka lakukan tidak punya akses, termasuk informasi yang memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara layak.

Untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah program penanggulangan kemiskinan yang dipandu oleh semangat demokrasi, yaitu

dengan memberikan peluang dan mekanisme yang memungkinkan komunitas untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan itu terutama yang akan mempengaruhi nasib mereka di masa mendatang. Peluang dan mekanisme partisipasi yang melekat di dalam desain program, dibangun atas dasar asumsi bahwa keterlibatan komunitas khususnya kelompok miskin akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempengaruhi keputusan-keputusan signifikan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan dan kepentingan mereka.

Perubahan sosial akan berjalan dengan lancar atau diterima dengan baik bilamana perubahan tersebut mendukung kebutuhan dan kepentingan masing-masing kelompok. Sebuah kelompok masyarakat tidak akan tertarik dengan suatu gejala perubahan bilamana perubahan tersebut tidak menguntungkan dirinya. Bahkan suatu program peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali merupakan sebuah kepentingan kelompok yang terselubung.

Dalam implementasinya, pemerintah menggunakan satu asumsi bahwa struktur negara merupakan satu struktur yang sejalan, dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sehingga dalam implementasi program tersebut pemerintah menggunakan jalur formal mengikut pada struktur formal negara. Mulai dari departemen, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun. Program-program pengentasan kemiskinan dijalankan dan disalurkan melalui jalur formal ini.

Salah satu kegiatan pengkomunikasian program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah adalah apa yang disebut dengan sosialisasi dan diseminasi program pembangunan pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain ada proses komunikasi dan penyebaran informasi dari lembaga pemerintah ke masyarakat yang mengikut jalur formal atau saluran resmi menurut mekanisme yang diyakini pemerintah berlangsung benar dan normal hingga ke targetnya yaitu orang miskin. Namun dalam kenyataannya, asumsi pemerintah ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diasumsikan. Bahwa secara teoritis, baik secara sosiologis maupun berdasarkan ilmu komunikasi, bahwa masyarakat punya struktur dan jaringan

komunikasinya sendiri. Sering bahkan tidak sama dengan definisi formal pemerintah itu sendiri. Tiap kelompok masyarakat memiliki struktur dan jaringan sosial, dan setiap masyarakat punya struktur dan jaringan komunikasinya sendiri.

Hal demikian pada gilirannya akan menghambat kelancaran arus komunikasi, di mana masing-masing orang atau kelompok membuat semacam aturan siapa berkomunikasi dengan siapa. Adanya nilai, norma, dan kebiasaan yang mengatur pola komunikasi dalam masyarakat, akan menyebabkan terpusatnya kepemilikan informasi pada pihak-pihak tertentu dalam lapisan/ stratifikasi masyarakat. Sumbatan-sumbatan arus komunikasi berakibat pada tidak sampainya informasi kepada khalayak sasaran yang tepat. Dengan kata lain ada sebagian orang atau kelompok yang tidak mendapatkan akses pada suatu informasi karena struktur sosial yang mempersulitnya.

Dalam konteks teori relasi pertukaran sosial, sebuah interaksi di antara anggota-anggota dalam jaringan komunikasi merupakan suatu bentuk dari pertukaran sosial yang dipahami dalam level mikro dan makro (Emerson, 1976). Level mikro menganalisis bagaimana suatu hubungan diadik dapat tercipta di antara dua orang yang saling bertukar (informasi) dan pada level makro mengkaitkan struktur sosial masyarakat yang mempengaruhi pola interaksi diadik tersebut. Teori relasi pertukaran berasumsi bahwa orang saling berinteraksi karena ada sumber daya yang dibutuhkan dan dicari yang bisa dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Pola interaksi yang terpelihara merupakan gambaran dari tarik ulur *reciprocal power* untuk mengendalikan *power advantage* sehingga relasi yang kohesif dapat terbina dengan baik. Tarik ulur kekuatan yang ada menimbulkan ketergantungan dan keseimbangan yang salah satunya dilakukan dalam proses pertukaran informasi, selain hal-hal yang bersifat materi tentunya.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis jaringan komunikasi (*social network analysis*), dalam upaya memperoleh pemahaman mengenai jaringan komunikasi sosial di masyarakat perdesaan pada saat ini. Analisis

jaringan komunikasi adalah sebuah metode riset untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam sebuah sistem, dimana *relational data* mengenai arus-arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan beberapa tipe hubungan interpersonal sebagai unit analisis (Rogers & Kincaid, 1981 : 75).

Eksklusi Sosial dan Keterbatasan Akses

Eksklusi sosial adalah proses yang menghalangi atau menghambat individu atau kelompok dari sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat dengan utuh. Proses ini terutama sebagai konsekuensi dari kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tetapi bisa juga dampak dari faktor lain seperti diskriminasi, tingkat pendidikan yang rendah, dan merosotnya kualitas lingkungan. Melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian besar masyarakat.

Kemiskinan merupakan penyebab terbesar yang membuat orang berpeluang mengalami eksklusi sosial. Karena miskin maka seseorang tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, makanan bergizi, pakaian yang layak, perumahan yang memadai, dan tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja. Bahkan, kemiskinan juga dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memasuki jaringan komunikasi sosial karena perbedaan status sosial-ekonomi dari anggota lainnya dalam jaringan.

Orang-orang yang mengalami eksklusi sosial, juga mengalami keterbatasan akses berbagai informasi. Bisa dibayangkan orang yang

tidak masuk pada jaringan komunikasi mencari pekerjaan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya, orang yang tidak masuk pada jaringan komunikasi bantuan modal usaha akan kesulitan untuk mengakses berbagai sumber permodalan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya, orang yang tidak masuk jaringan komunikasi keuangan akan kesulitan mengakses layanan jasa lembaga keuangan. Bahkan apabila seseorang tidak dapat masuk pada jaringan komunikasi sosialnya, maka orang tersebut akan terpinggirkan dari lingkungan sosialnya.

Kriteria yang menentukan tingkatan kemiskinan informasi atau kekayaan informasi seseorang adalah informasi itu sendiri, infostruktur, dan tingkat pemahaman informasi (*information literacy*). Mereka yang miskin informasi tidak memiliki cukup informasi atau tidak memiliki kesempatan mendapatkan informasi yang tepat. Informasi bukan hanya sumber pengetahuan tetapi juga sumber daya spesial yang bisa memajukan kebebasan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Bisa dikatakan bahwa akses dan pemanfaatan informasi dan komunikasi adalah kondisi dasar untuk pembangunan karena memberikan dampak pada setiap dimensi kehidupan. Demikian juga, kemiskinan informasi dan komunikasi hanya satu dimensi dari kemiskinan tetapi memberikan dampak pada semua dimensi lainnya.

Berdasarkan temuan di lapangan, eksklusi sosial dialami oleh nelayan kecil karena keterbatasan yang mereka miliki. Untuk gambaran mengenai pengelolaan potensi sumber daya laut dapat dilihat dari karakteristik alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Dusun Wanasari, sebagai berikut:

Tabel: Jenis Peralatan Tangkap Perikanan Laut

No.	Keterangan	Jenis Perahu		
		Kecil (1 - 10) GT	Sedang (11 - 30) GT	Besar (31 & lebih) GT
1.	Jenis perijinan	Dinas Perhubungan dan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten	Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi	Departemen Perikanan dan Kelautan (Pusat)
2.	Biaya perijinan	Rp 100.000 - 250.000	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
3.	Jenis kayu	Jati	Jati & Merbo	Merbo

4. Harga perahu	Rp 25- 50 juta	Rp 60 - 200juta	Rp 200- 500juta
5. Lunas (panjang perahu)	5 - 8 Meter	9 - 11 Meter	12 - 15 Meter
6. Jenis alat tangkap	Jaring, Arad,Bubu	Gill Net	Gill Net
7. Panjang jaring	0,5 - 2 mil	2 - 4 mil	5 - 7 mil
8. Harga jaring	Sampai Rp 50juta	Rp 90 - 180 juta	Rp 180 juta lebih
9. Jenis ruangan yang ada dalam perahu	0 - 1 Palka (tempat penyimpanan ikan)	1.Cerubung 2.Kamar mesin 3.Palka (tempat ikan) sebanyak 2 - 3 buah	1.Cerubung 2.Kamar mesin 3.Palka (tempat ikan) sebanyak 4 - 5 buah
10. Jumlah awak/ nelayan dalam satu perahu	2 - 5 orang	6 - 12 orang	12 orang lebih
11. Kapasitas tangkapan yang bisa dibawa	50 - 200 kg ikan per hari (pulang pergi)	5.000 - 10.000 kg ikan per sekali melaut (15 - 30 hari)	10.000 kg ke atas per sekali melaut (1- 2 bulan)
12. Ketersediaan tempat pendingin/ pengawet ikan	Ada yang memakai 1 palka atau membawa fiber atau membawa box	2 - 3 palka (peti ikan)	4 - 5 palka atau ada yang memakai frizer
13. Kapasitas es yang dibawa	2 - 10 Balok	100 - 300 balok (1 palka = 100 balok)	400 - 500 balok
14. Kapasitas solar yang dibutuhkan	30 liter	500 - 2.000 liter	3.000 - 6.000 liter
15. Kapasitas beras yang dibawa	10 kilogram	1 - 2 kwintal	2 - 4 kwintal
16. Jenis lauk-pauk yang dibawa sebagai bekal	Mie, telur, daging, dll. Kurang lebih 1 juta	Kurang lebih Rp 5 juta	Kurang lebih Rp 10 juta
17. Ketersediaan GPRS	Tidak ada	Ada	Ada
18. Ketersediaan kompas	Ada	Ada	Ada
19. Ketersediaan sonar ikan	Tidak ada	Ada	Ada
20. Ketersediaan SSB	Tidak ada	Ada	Ada
21. Jenis alat masak	Kompor minyak tanah	Kompor minyak tanah	Kompor minyak tanah
22. Lamanya di laut	1 - 2 hari	1 minggu 1 bulan	1- 2 bulan
23. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi perbekalan	1 - 5 jam	3 hari	6 hari
24. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki perahu	5 hari	10 hari	1 bulan
25. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaring	Tidak ada waktu khusus, sambil pulang, memperbaiki perahu, dan ketika mengisi perbekalan digunakan untuk memperbaiki jaring	Tidak ada waktu khusus, sambil pulang, memperbaiki perahu, dan ketika mengisi perbekalan digunakan untuk memperbaiki jaring	Tidak ada waktu khusus, sambil pulang, memperbaiki perahu, dan ketika mengisi perbekalan digunakan untuk memperbaiki jaring

Keterangan

(1). 1 mil = 1.852 km, (2). 1 palka = 100 es balok (3). Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki perahu (no. 24) adalah waktu efektif pengerjaan perbaikan perahu, sedangkan waktu galang (waktu dibiarkan di atas tanggul atau tanah) tergantung dari pemilik perahu, (4). Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaring (no. 25) biasanya tidak ada waktu khusus karena perbaikan jaring dikerjakan setelah jaring dipakai sambil pulang, saat memperbaiki perahu, dan ketika sedang mengisi perbekalan, (5). Harga jaring menggunakan satuan berat. Harga 1 kilogram = Rp 100.000 sampai Rp 125.000. Biasa satuannya kwintal, (6). Perbedaan GT dengan PK dalam menentukan jenis perahu: GT = Gross Ton atau bobot kotor perahu, PK = Power Horse (PH) atau Tenaga Kuda adalah ukuran untuk mengukur tenaga mesin. Tenaga Mesin untuk menjalankan perahu. Hubungannya untuk menjalankan perahu dengan bobot kotor yang berat tentu harus menggunakan mesin dengan kekuatan tenaga yang tinggi. Perahu Kecil, Ukuran 1 sampai 10 GT, dapat dijalankan oleh mesin diesel dengan kekuatan 7 - 12 PH (ada perahu yang menggunakan satu mesin ada juga yang dua, untuk perahu arad kebanyakan menggunakan dua mesin). Perahu Sedang, Ukuran 11 sampai 30 GT, dapat dijalankan oleh mesin diesel dengan kekuatan 30 - 70 PH atau dengan mesin mobil dengan kekuatan 135 PS. Perahu Besar, Ukuran 30 GT ke atas, dapat dijalankan oleh mesin mobil ukuran 220 PS. Catatan: Mesin diesel perahu ukurannya PH, sementara mesin mobil ukurannya PS, 1 PS = 0,7 PH. Mesin mobil yang digunakan untuk perahu biasanya dibeli berupa ex mesin mobil dari Singapura. Mesin direnovasi kembali disesuaikan dengan penggunaan untuk perahu.

Berdasarkan spesifikasi jenis peralatan tangkap di atas, maka bisa dibayangkan betapa sulit aktivitas menangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan perahu 1-10 GT. Dengan peralatan seadanya dan daya tempuh perahu yang terbatas, para nelayan kecil berjuang untuk mendapatkan ikan di sekitar perairan pantai. Selain itu, untuk nelayan kecil juga tidak tersedia informasi mengenai daerah tangkapan, berbeda dengan nelayan-nelayan yang beroperasi menggunakan

perahu di atas 10 GT.

Untuk perahu di atas 10 GT yang mempunyai daya tempuh bermil-mil disediakan informasi lokasi tangkapan. Informasi mengenai lokasi penangkapan ikan diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) melalui satelit pendeteksi jarak jauh, disampaikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan untuk kemudian disalurkan kepada nelayan dengan daerah tangkapan di lingkaran dua ke atas yaitu lebih dari 4 mil. Dinas ini telah memiliki program penyaluran informasi lokasi penangkapan ikan melalui layanan SMS di no HP 0813 9550 3330. Hanya saja, dalam prakteknya Dinas ini menunggu nelayan untuk SMS terlebih dahulu, baru kemudian mereka menyampaikan informasi lokasi tersebut. Informasi SMS lokasi tangkapan berlaku untuk tiga hari, karena setelah itu ikan akan bergerak ke lokasi lainnya.

Pada kenyataannya informasi lokasi penangkapan ikan dari Dinas ini tidak banyak digunakan oleh nelayan. Ada pun yang menggunakan informasi ini adalah seorang mantan pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan, yang sekarang berprofesi sebagai juragan pemilik banyak perahu dan tambak. Juragan ini memberikan informasi daerah tangkapan ikan kepada nahkoda yang hendak atau sedang berada di laut untuk segera mencapai lokasi tangkapan yang teridentifikasi banyak ikannya. Sarana komunikasi yang digunakan antara juragan dengan nahkoda, yaitu dengan menggunakan radio panggil Side Single Band (SSB) yang dimiliki oleh perahu sedang dan perahu besar.

Dari para nahkoda juragan inilah, kemudian nahkoda-nahkoda dari juragan lainnya mencari informasi. Sebelum berangkat ke laut nahkoda mengontak nahkoda yang sedang berada di laut untuk memastikan ikan masih banyak di perairan yang akan dituju. Selain itu, karena faktor keselamatan bersama maka para nahkoda ini akan saling berbagi informasi mengenai lokasi tangkapan ikan sebab apabila terjadi kecelakaan di laut maka kapal terdekatlah yang biasanya akan datang menolong, bukan petugas patroli laut.

Penetapan Kriteria Kemiskinan Struktural

Dalam perspektif struktural pada

umumnya, dikatakan orang atau suatu kelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak memihak kepada kaum miskin. Atau karena negara tidak bisa dan tidak mampu mengurus rakyatnya. Disfungsi yang pertama tampak dalam hal fungsi distributif negara, yakni bagaimana negara mengalokasikan sumberdaya, anggaran, kesempatan ekonomi secara adil. Mestinya, dengan fungsi distributifnya, negara berkewajiban dalam membantu mereka-mereka yang termarjinalkan oleh mekanisme pasar dalam kehidupan ekonomi yang terjadi. Fenomena kemiskinan ekstrem dalam bentuk busung lapar dan kelaparan adalah sebuah cerminan kegagalan negara dalam mewujudkan fungsi distributifnya. Disfungsi yang kedua adalah disfungsi stabilitataif, yang mana negara tidak berhasil dalam menstabilkan perekonomian secara keseluruhan. Selain kelaparan dan kemiskinan absolut, masalah pengangguran juga merupakan contoh dari disfungsi negara yang kedua ini.

Ketika memahami kemiskinan struktural, yang banyak dilihat adalah struktur yang ada di sekitar orang miskin. Misalnya struktur perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, perkreditan, jaminan sosial, dan sebagainya. Kita sering kali lupa bahwa struktur terkecil dalam masyarakat juga berpeluang untuk menyebabkan kemiskinan struktural, yaitu keluarga. Sering kali kita mendengar perumpaan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam keluarga miskin, besar kemungkinan dia akan menjadi miskin juga.

Padahal semua manusia pada dasarnya dilahirkan sama. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kenyataan itu adalah ketidaksamaan, karena manusia ketika lahir tidak pernah bisa menentukan dari siapa dan di mana dia ingin dilahirkan. Sehingga dijumpai ketidaksamaan ada manusia yang dilahirkan dalam keluarga yang mempunyai kekayaan yang berlimpah dan kesejahteraan hidupnya terjamin, sedangkan ada sebagian manusia yang dilahirkan dalam keluarga miskin dan hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera.

Keluarga terbentuk dari adanya sebuah pernikahan antar individu, yaitu penyatuan

komitmen seorang laki-laki dan perempuan. Setelah menikah dan mengucapkan ikrar janji sumpah setia, sepasang suami-istri memberanikan diri untuk menambah satu atau lebih anggota keluarganya tersebut dengan memiliki seorang anak atau lebih. Karena mereka beranggapan bahwa, keluarga membentuk unit dasar dari masyarakat kita, maka pengaruh sosial yang paling banyak memiliki efek-efek yang paling menonjol terhadap anggotanya adalah keluarga. Unit dasar ini memiliki pengaruh yang begitu kuat terhadap perkembangan seorang individu yang dapat menentukan berhasil-tidaknya kehidupan individu tersebut. Bersamaan dengan itu pula, keluarga menyiapkan anak-anak untuk menerima peran-peran dalam masyarakat.

Keluarga juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota keluarganya. Bagi pasangan suami dan istri atau anggota keluarga yang dewasa, keluarga berfungsi menstabilisasikan kehidupan mereka, yaitu memenuhi kebutuhan kasih sayang, sosio-ekonomi, dan kebutuhan seksual. Bagi anak-anak, keluarga memberikan perawatan fisik dan perhatian emosional, dan seiring dengan itu, keluarga juga memberikan pengarahan perkembangan kepribadian. Sistem keluarga merupakan konteks belajar yang utama bagi suatu perilaku, pikiran dan perasaan dari seorang individu. Orang tua merupakan guru yang utama, karena orang tua menginterpretasikan dunia dan masyarakat bagi anak-anak. Orang tua menerjemahkan arti-arti penting yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan luar kepada anak.

Di semua masyarakat yang pernah dikenal, hampir semua orang hidup terikat dalam jaringan kewajiban dan hak keluarga yang disebut hubungan peran (*role relations*). Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki. Sebagai lembaga sosial terkecil, keluarga merupakan miniatur masyarakat yang kompleks, karena dimulai dari keluarga seorang anak mengalami proses sosialisasi. Dalam keluarga, seorang anak belajar

bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka acuan di setiap tindakannya dalam menjalani kehidupan.

Berbagai aspek pembangunan suatu bangsa, tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang saling mendukung, salah satunya sumber daya manusia. Terlihat pada garis-garis besar haluan negara bahwa penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. Hal ini pun tidak dapat terlepas dari peran serta keluarga sebagai pembentuk karakter dan moral individu sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas baik. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas baik tentunya memerlukan berbagai macam cara. Salah satu diantaranya adalah melalui pendidikan. Pendidikan baik formal maupun informal, pendidikan dalam keluarga salah satunya.

Pendataan dan Sosialisasi Program Pengentasan Kemiskinan

Permasalahan mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan serta pengurangan kemiskinan beserta percepatannya mencakup dua pokok, yaitu pendataan dan sosialisasi. Aspek pendataan kelompok-kelompok miskin dalam berbagai kategorinya baik berupa penduduk miskin maupun keluarga miskin masih menjadi masalah, dalam upaya menentukan siapa sebenarnya yang berhak disebut penduduk miskin.

Penentuan kriteria penduduk dan rumah tangga miskin telah ditetapkan oleh BPS, dan digunakan sebagai dasar bagi penentuan penduduk dan keluarga miskin di Indonesia. Secara sederhana, pengertian terhadap kemiskinan diambil dari besaran penghasilan/pendapatan per-orang yang digunakan untuk mengkategorikan miskin-tidaknya seseorang. Ada beragam pendapat mengenai definisi kemiskinan ini. Mulai dari pendekatan standar kemiskinan internasional yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yakni mereka yang berpendapatan di bawah US\$ 2 per hari, sampai ke pendekatan kebutuhan ragawi, yakni

penghasilan yang dibutuhkan untuk memungkinkan konsumsi senilai 2.100 kalori per kapita per hari. BPS sendiri, sebagai lembaga data resmi Pemerintah, mengukur angka kemiskinan dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penanggulangan kemiskinan memang sulit sekali dilakukan kalau data mengenai orang miskin hanya berupa persentase dari jumlah penduduk, baik itu di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, seperti yang sekarang dimiliki oleh BPS. Misalnya dikatakan 15 persen dari penduduk di Kabupaten X adalah miskin. Ada data-data mengenai orang miskin yang disertai dengan nama, RT/RW/desa di mana mereka tinggal, dan indikator kenapa mereka miskin. Data tersebut memang bisa dipakai untuk menunjukkan jumlah orang miskin, siapa dan tinggal di mana. Tapi data itu tidak bisa dipakai untuk melakukan upaya menarik orang keluar dari kemiskinan.

Untuk bisa mengentaskan orang dari kemiskinan, perlu diketahui terlebih dahulu penyebab kemiskinannya. Bhinneka Tunggal Ika, demikianlah semboyan yang dijunjung Indonesia. Semboyan itu juga berlaku untuk masalah kemiskinan. Indonesia bukan hanya bervariasi dalam kondisi geografis dan ekonomisnya, tapi juga dalam kondisi politik dan sosialnya. Akibatnya, indikator kemiskinan tidak bisa hanya ditetapkan pada tingkat nasional dan diberlakukan secara umum. Contohnya berdasarkan tingkat pendapatan yang dihitung per hari, padahal dengan kondisi yang tidak menentu seorang nelayan bisa jadi suatu hari memiliki pendapatan yang besar, tetapi di hari-hari berikutnya bisa tidak berpenghasilan karena tidak mendapatkan hasil tangkapan. Seorang petani tambak karena sudah berhutang kepada bakul untuk bibit, pupuk, pakan, obat, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, maka ketika panen bisa jadi bukan penghasilan yang diperolehnya malah bertambah hutangnya. Karena itu, yang namanya indikator kemiskinan harus menggabungkan antara indikator nasional yang bisa diperbandingkan dan indikator lokal yang sesuai

dengan fenomena kemiskinan di masing-masing daerah.

Berdasarkan kebhinnekaan fenomena kemiskinan di Indonesia, pendataan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara sentralistis yakni lembaga-lembaga nasional seperti BPS dan Bappenas menentukan indikator-indikator kemiskinan yang kemudian diberlakukan secara umum untuk mengidentifikasi orang miskin di segala penjuru Indonesia. Kalau pendekatan sentralistis itu yang dilakukan, bisa dipastikan identifikasi orang miskin tidak akan akurat, bukan saja dalam hal orang miskinnya, tapi juga penyebab kemiskinannya yang jelas beragam dari satu daerah ke daerah lainnya. Alhasil, upaya menarik penduduk keluar dari kemiskinan juga tidak akan pernah berhasil.

Memang selama ini ada ketidakpercayaan yang besar terhadap Pemda dalam hal penentuan jumlah penduduk miskin. Banyak yang khawatir apabila Pemda diberi wewenang untuk melakukan pendataan orang miskin, mereka akan melakukan penggelembungan jumlah penduduk miskin, yang kemudian mereka pakai menekan pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah mereka masing-masing. Semakin banyak jumlah penduduk miskinnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk memperoleh peningkatan DAU. Kalau hal itu terjadi, data tentang penduduk miskin yang terkumpul juga tidak akan bisa dipakai untuk mengembangkan strategi pengentasan penduduk miskin. Masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan mekanisme kontrol bagi Pemda untuk secara tepat dan akurat mengidentifikasi orang miskin dengan bantuan pengawasan dari BPS. Karena kalau diperhatikan, BPS ada perwakilan kantor cabang di setiap Kota Kabupaten di Indonesia.

Permasalahan mendasar kedua terkait dengan sosialisasi program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Aspek ini sangat menentukan keberhasilan program pengurangan dan penanggulangan kemiskinan karena merupakan wadah untuk pengenalan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi program. Sosialisasi ini mencakup pula pemberdayaan saluran-saluran komunikasi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang telah

ada.

Mengingat betapa banyaknya program-program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, tetapi yang menjadi sasaran program tidak tahu kalau ada program untuk mereka. Sebaliknya program hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan para Pemimpin formal yang dijadikan saluran komunikasi. Maka dapat dimengerti bila banyak dari program-program tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kecenderungan yang ada adalah kegiatan sosialisasi program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan bersifat seremonial. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan mengundang unsur-unsur pemerintahan, dinas-dinas terkait, dan pemuka-pemuka pendapat yang dipersepsi dapat menyalurkan pesan kepada masyarakat. Padahal justru masyarakat memiliki saluran dan jaringan komunikasinya sendiri, yang selama ini belum diidentifikasi secara serius.

Lemahnya Koordinasi Lembaga Informasi Pusat dan Daerah

Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimanakepada daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segenap urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal serta urusan agama. Namun demikian urusan komunikasi informasi berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tidak secara jelas/tegas merupakan urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga keberadaan Lembaga Komunikasi Pemerintah Daerah yang ada di provinsi, Kabupaten, Kota sangat beragam tidak menjadi keharusan, dan tupoksinya tidak mengacu pada tupoksi Departemen Kominfo. Keberadaannya juga bukan merupakan sub ordinasi Departemen Kominfo. Akibat dari hal itu, lemahnya dasar hukum perihal koordinasi antara lembaga informasi pusat dan daerah yang berpengaruh pada terhambatnya arus informasi nasional.

Dari aspek Kelembagaan keberadaan lembaga Komunikasi Pemerintah Daerah berdasarkan PP No. 8 Tahun 2003 ditambah dengan persepsi terhadap fungsi komunikasi informasi (pelayanan informasi) yang tidak

proporsional dan subyektif menimbulkan keragaman nomenklatur, tugas pokok dan fungsi, serta ruang lingkup kewenangannya. Ini terjadi hampir di semua daerah, keragaman nomenklatur lembaga infokom di daerah yaitu: Badan, Biro, Dinas, Kantor, Bagian, Bidang bahkan Seksi yang bersifat tidak operasional. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya kelancaran arus informasi dan diseminasi informasi nasional, apalagi sampai saat ini persepsi Pemda tentang lembaga komunikasi pemerintah daerah masih diartikan sebagai lembaga kehumasan ataupun Kantor Departemen Penerangan pada masa lalu.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia yang menangani bidang komunikasi dan informasi pada dinas/badan/biro/kantor/bagian di daerah secara umum belum memadai dilihat secara kualitas maupun kuantitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja lembaga tersebut. Dari segi kuantitas SDM yang ada pada lembaga infokom saat ini masih banyak mengandalkan pada potensi yang ada di internal satuan kerja tersebut, mengingat kebijakan Pemerintah untuk menerapkan prinsip nol pertumbuhan (*Zero Growth*) di bidang kepegawaian. Sehingga sulit untuk mengadakan penambahan pegawai baru yang dibutuhkan untuk mengelola bidang komunikasi dan informasi berdasarkan kompetensi tersebut.

Sarana Komunikasi yang diharapkan mampu menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan informasi kurang memadai, hal ini terjadi akibat dari antara lain keterbatasan kemampuan keuangan daerah, persepsi dan bobot yang diberikan pada fungsi diseminasi informasi dan komunikasi sangat beragam dan tidak proposional, terutama untuk Provinsi, Kabupaten/Kota Pemekaran. Sementara itu sarana komunikasi eks Deppen yang telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah, kebanyakan kondisinya sudah tidak layak pakai. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus informasi dan diseminasi informasi Nasional.

Sejalan dengan terjadinya reformasi di berbagai bidang terlebih dengan dibubarkannya Departemen Penerangan, dan masalah informasi diserahkan kepada masyarakat serta pelaksanaan otonomi, telah terjadi kesenjangan informasi

nasional dari pusat ke daerah, apalagi kepada masyarakat. Sehingga untuk ini perlu upaya-upaya penataan ulang sistem koordinasi lembaga informasi pusat dan daerah untuk mengetahui kebutuhan informasi nasional yang diperlukan masyarakat.

Pemberdayaan Jaringan Komunikasi Sosial

Para ahli komunikasi terutama di negara-negara berkembang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap strategi komunikasi dalam hubungannya dengan penggiatan pembangunan nasional di negara-negara masing-masing. Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting karena efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan. Komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

Dari beberapa hasil penelitian tentang model komunikasi kebijaksanaan program pembangunan selama ini yang dikembangkan oleh pemerintah adalah mengacu pada model komunikasi linier searah dan berbentuk vertikal dari atas ke bawah (*top down*), bersifat perintah dan jika dievaluasi model linier ini mempunyai banyak kelemahan, karena dianggap tidak memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat setempat. Setelah model komunikasi linier satu arah dianggap kurang sempurna, kini pandangan orang mulai mengarah pada komunikasi interaktif dua arah di antara partisipan. Model komunikasi interaktif atau konvergen ini (Schramm 1973; Rogers dan Kincaid 1981) dianggap sebagai suatu transaksi di antara partisipan, yang setiap orang memberikan kontribusi pada transaksi itu, meskipun dalam derajat yang berbeda. Terlebih lagi, model ini berlaku baik untuk situasi komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa.

Dalam pandangan model konvergensi tetap

memberikan ruang bagi orang-orang yang dianggap mampu berperan sebagai pemuka pendapat untuk menerima pesan dari media dan menyebarkannya melalui saluran komunikasi interpersonal kepada pengikutnya. Kecenderungan yang ada adalah penggunaan pemuka-pemuka pendapat yang mudah dikenali, bersifat formal, tetapi memiliki pengaruh yang lemah. Sehingga menimbulkan keterbatasan kemampuan pemuka pendapat formal dalam hal mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya guna memahami berbagai jenis informasi. Dengan demikian pemuka pendapat tidak dapat terlalu banyak diharapkan untuk menyalurkan banyak hal dengan sekaligus. Karena seorang pemuka pendapat yang berpengaruh terhadap sejumlah orang mengenai sejumlah hal, belum tentu mempunyai wilayah pengaruh yang lebih luas mengenai hal-hal yang lain daripada para pemimpin informal.

Hasilnya jaringan komunikasi sosial yang sesungguhnya kurang atau bahkan tidak diberdayakan. Dengan alasan keterbatasan waktu, biaya, dan personil maka jaringan komunikasi sosial belum banyak dikenali oleh para pemangku kepentingan yang bergerak di bidang komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah pemberdayaan jaringan komunikasi yang kurang menyentuh masyarakat.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi mempunyai posisi yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau suatu negara. Atau dalam lingkup yang lebih kecil, ekonomi daerah. Menurut penelitian International Telecommunication Union (ITU), pertumbuhan atau penambahan satu persen teledensitas akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi sebesar tiga persen.

Sementara jumlah satuan sambungan telepon (SST) di Indonesia sangat rendah karena baru mencapai 6,7 juta SST dengan rasio jumlah penduduk sebanyak 220 juta penduduk. Hanya tiga SST untuk per 100 penduduk atau dapat dihitung teledensitasnya hanya tiga persen. Negara ASEAN seperti Singapura tingkat pertumbuhannya relatif sangat tinggi, teledensitasnya mencapai 58 persen, dan Malaysia sudah mencapai 30 persen.

Hal ini menunjukkan, sebagian besar masyarakat Indonesia belum terjangkau fasilitas telekomunikasi, sehingga tak heran jika pertumbuhan ekonominya juga terbilang sangat rendah.

Pertumbuhan pengguna telepon bergerak di Indonesia sangat dramatis. Lihat saja, jika sebelumnya diprediksi bahwa pengguna telepon seluler (ponsel) baru akan melampaui angka psikologis 100 juta pada 2009, kenyataannya di tahun 2008 separuh penduduk Indonesia telah diperkirakan telah terkoneksi akses telekomunikasi, dimana dalam catatan regulator, jelang akhir tahun 2008 saja pengguna sudah melebihi angka 130 juta pengguna. Selain teledensitas pengguna, telepon bergerak juga memberikan kontribusi berarti dalam hal penetrasi (persentasi dari populasi). Hampir semua kecamatan di Indonesia telah terjangkau sinyal ponsel. Bahkan kini, operator-operator seperti Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL, juga mulai berlomba-lomba memberikan layanan di daerah terpencil dan terluar di wilayah Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Telekomunikasi No. 36/1999, persoalan akses hanyalah di satu sisi. Sementara di sisi lain, ada tujuan yang lebih dari telekomunikasi yang sekadar sebagai alat, yaitu bagaimana layanan telekomunikasi bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Secara kasat mata, diakui memang saat ini begitu banyak kalangan memanfaatkan dan mendapat manfaat dari layanan dan bisnis telekomunikasi. Bukan cuma orang kota, orang tua dan hanya pegawai kantoran, melainkan juga hingga pelosok kampung, anak-anak, serta tukang ojek, bahkan tukang ojek merasa perlu memiliki HP agar pelanggan dapat menghubunginya jika dibutuhkan. Gerai-gerai penjual *voucher* juga bertebaran di mana-mana karena pulsa kini telah melengkapi sembako menjadi kebutuhan pokok kesepuluh.

Selain perkembangan tersebut, kini saatnya kita memikirkan peran besar lain yang dapat disumbangkan telepon bergerak untuk kemaslahatan rakyat. Peran itu berupa layanan nilai tambah, seperti m-government, m-business, m-health maupun m-learning, menggantikan peran e-government, e-business, e-health maupun e-learning yang saat ini masih belum berjalan efektif karena terkendala dengan jumlah pengguna Internet yang

masih sangat jauh dibanding pengguna ponsel.

Dengan m-government, maka sesungguhnya layanan pemerintahan dapat pula dijalankan secara bergerak dan hanya melalui ponsel. Misalnya saja pemberitahuan mengenai masa berlaku KTP dan SIM yang akan habis, semua informasi bisa disampaikan dengan cara mudah, baik melalui SMS, MMS maupun layanan data 3G atau GPRS. Begitu juga dengan layanan bisnis, saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan layanan m-banking. Pendidikan juga sudah mulai memanfaatkan layanan ponsel untuk mengemukakan hasil ujian. Namun sebenarnya, potensinya bisa lebih besar seperti membuka peluang-peluang usaha dan memperluas jaringan pemasaran.

Untuk mewujudkan itu semua yang diperlukan adalah dukungan membangun ekosistem implementasi layanan berbasis telepon bergerak. Pemerintah harus aktif mendukung inisiatif layanan bergerak, terutama untuk layanan publik. Industri ditantang untuk memperkuat infrastruktur dan menyediakan lingkungan akses broadband memadai. Masyarakat perlu juga memberi masukan layanan-layanan yang dibutuhkan, khususnya layanan yang yang mencerdaskan, membangun karakter bangsa dan mensejahterakan masyarakat.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi menuju masyarakat informasi bukanlah tugas yang mudah, melainkan banyak menemui hambatan. Berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari hal-hal yang bersifat teknologis hingga aspek sosial-budaya merupakan hambatan dalam pelaksanaan program USO ini. Dari aspek teknis, fasilitas telekomunikasi (fastel) ada juga yang sudah rusak baik disebabkan oleh bencana alam maupun karena kesalahan operasional. Dari aspek sosial-budaya, kesiapan masyarakat dalam menerima program ini juga masih terhambat kendala minimnya rasa memiliki terhadap program, belum berkembangnya kesadaran bahwa fastel berpotensi sebagai sarana kreasi dan inovasi, kemampuan berorganisasi masyarakat yang masih rendah, semangat kewirausahaan yang masih minim, dan fastel kurang memberi peluang bagi masyarakat miskin untuk mengakses karena lokasi

penempatannya lebih banyak dipusatkan hanya di kalangan elit desa.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa dusun yang menjadi lokasi penelitian telah merambah jaringan telepon seluler, sedangkan jaringan *fixed line* tidak ditemukan. Kepraktisan dan harga yang lebih murah, menjadi pertimbangan utama bagi warga desa untuk menggunakan telepon seluler. Iklim bertelekomunikasi yang tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat ini ditunjukkan dengan kepemilikan pesawat telepon seluler dan tersedianya tempat penjualan pulsa di desa.

Namun demikian, HP pada kenyataannya belum mampu merubah pola komunikasi antara aparat pemerintahan desa dengan warganya. Karena salah satu sifat menonjol dalam masyarakat perdesaan di Indonesia yaitu karakteristik masyarakat yang patrimonialistik, yaitu adanya tokoh masyarakat yang memiliki posisi sebagai patron (bapak), sedangkan warga biasa atau rakyat pada umumnya adalah kliennya. Hubungan keduanya bersifat vertikal, sehingga arus komunikasi sosial berjalan searah dari atas ke bawah mengikuti hirarki sosial yang telah terlembagakan.

Di antara para aparat desa itu sendiri yang berada dalam lingkungan birokrasi yang memiliki status dan peran secara hirarkhis, ternyata pola komunikasinya masih mencerminkan karakteristik patrimonialistik. Kehadiran HP hanya dipakai sebagai sarana untuk kepentingan yang lebih teknis dan praktis, misalnya dalam mengundang rapat-rapat di lingkungan kantor desa dimana aparat desa dapat menghubungi langsung RW dan RT di bawahnya. Tetapi jika aparat desa yang lebih rendah mengundang rapat aparat yang lebih tinggi, mereka masih tetap menggunakan surat undangan. Bahkan hal seperti ini pun terjadi di antara majikan dan bawahan, seperti pemilik kapal, pemilik tambak dan bakul lebih leluasa menghubungi buruh dan nelayan kecil di bawah mereka, tetapi tidak sebaliknya.

Beberapa negara maju berupaya mencegah jurang eksklusif ganda, yakni tereksklusif secara sosial (termasuk ekonomi, politik, dan budaya) dan secara digital. Misalnya Pemerintah Inggris, antara lain, mengeluarkan kebijakan *e-inclusion* dengan

tujuan memanfaatkan ICT untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Di Indonesia, Program CTLC (*community training and learning center*) Microsoft Indonesia bekerja sama dengan kelompok petani, menunjukkan penerapan Internet membantu meningkatkan penghasilan petani. Petani belajar mengoperasikan piranti komputer yang tersambung ke Internet. Program ini membantu petani mengakses informasi pertanian penting dan bahkan lebih jauh mengakses pasar langsung ke pembeli tanpa melalui pedagang perantara. Tetapi tidak selalu pemanfaatan ICT oleh individu dan kelompok yang tereksklusi secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya, bisa membawa mereka keluar dari status eksklusi itu. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menghubungkan orang dengan orang, bukannya sekedar menghubungkan alat dengan alat.

Simpulan

Saluran komunikasi interpersonal yang ada di masyarakat kenyataannya kurang diberdayakan sebagai saluran berbagai informasi bernilai lainnya. Misalnya untuk informasi mengenai pelatihan dan lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan, ditempatkan di papan pengumuman Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang letaknya di Kota Kabupaten. Sementara masyarakat yang berkeinginan kerja di dalam dan luar negeri menggunakan saluran komunikasi interpersonal tatap muka dengan orang-orang yang sudah dikenal sebagai agen kerja yang punya jaringan dengan kantor penyalur tenaga di Jakarta.

Temuan lainnya di lapangan menunjukkan hambatan struktural dalam hal penyaluran informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi di bidang pendidikan, ketenagaan-kerjaan, pelatihan, pemasaran, penjualan, dan bahkan lokasi penangkapan ikan, nyatanya lebih menguntungkan elit informasi. Misalnya bidang pengembangan sumber daya manusia diperuntukkan bagi mereka yang sudah terlebih dahulu memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Informasi mengenai pemasaran, penjualan, dan perkreditan dikuasai oleh pedagang perantara yang memiliki modal. Lokasi penangkapan ikan dikuasai oleh juragan-juragan perahu besar.

Kemajuan teknologi telah meningkatkan mobilitas sosial dan mempermudah orang untuk saling berinteraksi dimana pergaulan berlangsung berupa kontak-kontak pribadi diikuti oleh tukar-menukar gagasan dan pengalaman. Hubungan manusia dari satu bangsa dengan bangsa lainnya semakin intensif dan dunia seolah-olah menjadi semakin sempit. McLuhan menyebut dunia sekarang sebagai *a global village* (Straubhaar dan Larose, 2002). Televisi menyebabkan *global village* dalam istilah McLuhan dan yang terpenting adalah *essence of information*, misalnya gossip dari mulut ke mulut dipahami dan orang seolah-olah merasa dekat dengan yang mereka bicarakan.

Sumber informasi yang ternyata sudah lebih banyak digunakan adalah TV, radio, dan ponsel. Hampir semua responden memiliki TV, hampir sepertiganya memiliki radio, dan hampir setengah responden memiliki ponsel. Menilik pemanfaatan media tersebut belum digunakan sepenuhnya untuk mencari informasi yang bernilai ekonomi, misalnya TV kebanyakan digunakan untuk menonton sinetron, radio untuk mendengarkan lagu dan musik, dan ponsel digunakan untuk urusan keluarga.

Teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan khalayak akan kedekatan informasi yang dibutuhkannya, yaitu melalui ponsel. Sementara radio kontennya ditentukan dari Pusat penyiaran, sehingga radio tidak menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Untuk keberlangsungan hidup media yang sangat diperlukan yakni kontennya. Kemajuan teknologi ini juga telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang sedang membangun. Melalui radio, televisi, film, surat kabar, ponsel dapat dikatakan hampir seluruh pelosok tanah air telah terjangkau oleh jaringan komunikasi yang menghubungkan pusat dan daerah. Pesan-pesan pembangunan dari pusat ke daerah dan sebaliknya dapat disalurkan melalui media tersebut.

Kemajuan teknologi komunikasi jelas akan membawa dampak, baik positif maupun negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara positif akan memberikan kemungkinan terjadinya komunikasi secara lebih baik, lebih cepat, dan luas jangkauannya. Sebaliknya, dampak negatif menimbulkan masalah pertentangan sosial

dan perubahan sistem nilai, karena adanya perbenturan sistem nilai dalam masyarakat penerima teknologi yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda.

Kaitannya dengan jaringan komunikasi, asumsinya teknologi memudahkan orang dalam melakukan kontak dengan anggota jaringan lainnya. Selain itu, teknologi juga dapat mempercepat kontak, mengatasi hambatan jarak dan waktu, serta memperluas jaringan yang ada. Seperti dikatakan Monge dan Contractor (2003), bahwa teknologi komunikasi seperti telepon, *mobilephone*, dan Internet telah membuat orang menjadi lebih leluasa berkomunikasi. Bahkan kedekatan fisik (*physical proximity*) sekarang ini dapat digantikan dengan kedekatan elektronik (*electronic proximity*).

Tetapi berdasarkan temuan di daerah penelitian, asumsi-asumsi ini ada yang diperkuat dan ada juga yang dibantah. Teknologi pada kenyataannya bisa mempercepat kontak dengan mengatasi hambatan jarak dan waktu. Namun, teknologi belum terbukti mampu memperluas jaringan. Hal ini dibuktikan dengan pola pemanfaatan ponsel yang lebih banyak digunakan untuk menghubungi orang-orang yang sebelumnya sudah dikenal dan menjadi bagian dari anggota jaringan, atau bukan anggota baru. Dalam hal ini masih ada hambatan yang belum bisa diatasi oleh teknologi komunikasi.

Hambatan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam penelitian ini utamanya disebabkan oleh faktor struktural yang berdampak pada budaya komunikasi tertentu. Contoh di dalam masyarakat ada pelapisan sosial berdasarkan status sosial-ekonomi seseorang. Misalnya seorang juragan pemilik kapal leluasa menghubungi nahkoda melalui ponsel, tetapi tidak sebaliknya. Bahkan kepada orang yang memiliki status sosial-ekonomi lebih tinggi, masih diperlukan orang lain sebagai penghubung, yaitu melalui orang yang sudah kenal baik atau bekerja pada yang bersangkutan.

Pola konsumsi media massa di kalangan orang miskin di daerah penelitian menunjukkan pemanfaatan media lebih banyak pada sisi hiburannya karena itu yang banyak tersedia di media saat ini. Layanan jasa telekomunikasi

diharapkan dapat berperan sebagai pemerata (*equalizer*), karena asumsinya semua orang memiliki kemampuan menggunakan teknologi yang sama sehingga teknologi dapat membuat orang leluasa berkomunikasi dengan siapa pun dan dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. Kenyataannya tidak demikian, sehingga perlu adanya suatu pembelajaran bagaimana menggunakan dan memanfaatkan ponsel untuk meningkatkan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (eds.), 1980, *Kemiskinan Struktural; Suatu Bunga Rampai*, HIPIS, Malang.
- Dahlan, M. Alwi, 1976/1977, *Sistem Jaringan Komunikasi Sosial yang Memadai di Indonesia (I)*, Departemen Penerangan RI kerjasama dengan PT Inscore Indonesia, Jakarta.
- _____, *Pemerataan Informasi, Komunikasi dan Pembangunan*, 1997, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok.
- Emerson, Richard M., 1976, *Social Exchange Theory*, *Annual Review of Sociology*, Vol. 2, pp. 335-362, <http://www.jstor.org/stable/2946096>.
- Freeman, Linton C., J. Clyde Mitchell, dan Rolf Ziegler (eds.), 1980, *Social Networks*, Elsevier Sequoia S.A., Lausanne.
- Kincaid, Lawrence D., dan Wilbur Schramm, 1976, *Asas-asas Komunikasi antara Manusia*, Konsultan pengarang Ronny Adhikarya, dibantu Wan Firuz Wan Mustafa dan Habsah Haji Ibrahim, Penerbit Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
- Monge, Peter R., dan Noshir S. Contractor, 2003, *Theories of Communication Networks*, Oxford University Press, Madison Avenue.
- Rogers, Everett M., dan D. Lawrence Kincaid, 1981, *Communication Networks, Toward a New Paradigm for Research*, The Free Press, New York.
- Setiawan, Bambang, 1989, *Pelapisan Sosial dan*

*Jaringan Komunikasi, Penelitian di
Desa Senik Kalurahan Bumirejo
Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon
Progo Daerah Istimewa Yogyakarta,
UGM, Yogyakarta.*

